

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|----------|----------------------|-------|---|-----------------------|---|-----|-----------------|------|----|--------------|----|---------|-----------------|-----------|----|---------------|---------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|----|----|----|
| | Halaman | | | | | | | | | | | | Muka | | | | | | Dalam | | | | | | | | | | | | |
| Media | 1. Batam Pos | | | 2. Haluan Kepri | | | 3. Koran Sindo 17 | | | 4. Tribun Batam | | | | | | 5. Kompas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entitas | 1. Provinsi Kepri | | | 2. Kota Batam | | | 3. Kota Tanjungpinang | | | 4. Kab. Bintan | | | | | | 5. Kab. Karimun | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. Kab. Natuna | | | 7. Kab. Kep. Anambas | | | 8. Kab. Lingga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tgl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Bulan | Januari | | Februari | | Maret | | April | | Mei | | Juni | | Juli | | Agustus | | September | | | Oktober | | | November | | | Desember | | | | | |
| Jenis Tulisan | HEADLINE | | | | | | HEADLINE DALAM | | | | | | NON HEADLINE | | | | | | ARTIKEL | | | | | | | | | | | | |
| | FEATURE | | | | | | WAWANCARA | | | | | | OPINI | | | | | | TAJUK RENCANA | | | | | | | | | | | | |

KLIPING BERITA

Cegah Korupsi Sejak Dini

DPRD Ajukan Perda Inisiatif TP4D

PINANG – DPRD Kepri akan mengajukan Perda inisiatif tentang Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Perda ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran atau praktik korupsi sejak dini, di setiap kegiatan/proyek pemerintahan.

Ketua DPRD Kepri Juma-ga Nadeak berharap, adanya Perda tentang TP4D ini, para pejabat pengguna anggaran tidak takut lagi menjalankan kegiatan. Tim Kejaksaaan akan memberi pendampingan selu-

ruh kegiatan pembangunan di Kepri mulai dari tahap awal. Dengan demikian, penyimpangan anggaran dan tinda-kan melawan hukum dapat dicegah sejak dini.

Ke hal 20))

((Dari hal 17

Perda ini juga akan menjadi acuan pendampingan bagi peja-bat dan mengawal penyerapan anggaran di masing-masing OPD Pemprov Kepri.

"Selama ini kan banyak proyek pemerintah yang tidak jalan karna pejabatnya takut, berpotensi dikriminalisasi. Hadirnya perda ini, kami har-papkan semua pejabat dapat melaksanakan kegiatan pem-bangunan yang sudah diren-canakan dengan tenang," ka-tanya saat memimpin rapat Badan Musyawah (Banmus) di Gedung DPRD Kepri, Dompok, Tanjungpinang, Senin (4/9).

Jumaga mengatakan, sela-ma ini payung hukum untuk program pendampingan TP4D masih berupa peraturan guber-nur (Pergub). Karena itu, per-

lu ditingkatkan menjadi perda agar lebih baik.

Menurutnya, naskah akade-mis Ranpeda TP4D sudah ada. Setelah DPRD membentuk pan-tia khusus (pansus), selanjutnya pansus tinggal bekerja mema-sukkan pasal-pasalnya dengan mengadopsi aturan yang telah ada. "Untuk hak inisiatif ini, di-gendakan hari Rabu tanggal 13 September," katanya.

TP4D merupakan penjabar-an dari instruksi Jaksa Agung Nomor 1/A/JA/10/2015 yang memberi pertimbangan atau konsultasi hukum bagi insti-tusi pemerintah. Instruksi Ke-jagung itu mendukung aspek tatausaha negara dalam pem-bangunan pusat dan daerah untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pember-

antasan Korupsi Tahun 2015.

Kesalahan Administrasi Tak Dipidana

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri Andar Perdana Widiyanto menegaskan, ada ti-ga tugas utama jaksa, yakni se-bagai penuntut umum, sebagai pengacara negara dan penyidik tindak pidana korupsi. Dengan adanya Intruksi Presiden No-mor 1 Tahun 2016, Kejaksaan diberi amanah langsung oleh Presiden sebagai Tim Penga-walan, Pengamanan Pemerin-tah dan Pembangunan.

"Karena itu, kami meminta kepada kepala daerah dan kepala OPD di Kepri tidak ragu berkon-sultasi dengan kejaksaan dalam hal pelaksanaan kegiatan pem-bangunan. Ada catatan penting se-suai Intruksi Presiden tersebut,

yakni minimnya serapan ang-garan oleh pemerintah daerah," katanya.

Terbitnya Intruksi Presiden, tak lepas dari adanya rasa takut dari para pejabat pemerintahan untuk melaksanakan proyek/kegiatan. Andar menegaskan, Kejati Kepri siap memberi pendampingan dan pengawa-lan. Ia pun menjamin, tidak ada distresi dan kesalahan admin-istrasi yang akan dipidanakan.

"Bila ada kesalahan admin-istrasi, masih ada waktu sekitar 60 hari bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk penyelamatan keuangan negara. Kejati juga tidak akan mengekspose berita yang disebabkan kesalahan ad-ministrasi," ujarnya.

Gubernur Kepri Nurdin Basi-run dalam berbagai kesempatan, selalu mengajak seluruh elemen

masyarakat Kepri bahu-memba-hu dalam mewujudkan pemba-ngunan di daerah ini. Ia pun in-gin serapan APBN dan APBD di Pemprov Kepri dan pemerintah tingkat dua, berjalan sesuai ha-rapan dan aturan yang berlaku.

Nurdin mengajak seluruh kepala OPD dan wali kota/ bu-pati di Kepri meningkatkan koordinasi agar hal-hal yang selama ini menjadi rintangan dalam melaksanakan pemba-ngunan dapat teratasi.

"Memang masih ada pejabat yang merasa takut terjerat hu-kum saat menjalankan kegiatan atau proyek. Itulah sebabnya, mengapa banyak program tidak berjalan dengan baik dan sesu-ai rencana. Itu terbukti dengan minimnya serapan APBN dan APBD di Kepri," katanya.

● sutana